GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN LAYANAN KEWIRAUSAHAAN, KEPELOPORAN, DAN
KADERISASI PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Layanan Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Kaderisasi Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN KEWIRAUSAHAAN, KEPELOPORAN, DAN KADERISASI PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
13. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
14. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
15. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
16. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
17. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda
18. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
20. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan terhadap pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rencana strategis Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Gubernur mengembangkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda di Daerah Provinsi dalam rangka meningkatkan peran Pemuda.
- (2) Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda; dan
 - c. fasilitasi Pengembangan Kaderisasi Pemuda.
- (3) Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat memberikan fasilitasi pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan koordinasi bersama Dinas.

BAB III

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Dalam melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda, dapat melibatkan Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat.
- (3) Dinas melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. magang;
 - c. bimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, magang, bimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. penyediaan pendanaan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam rangka memperluas jaringan wirausaha dengan melibatkan:
 - a. dunia usaha;
 - b. lembaga pendidikan; dan
 - c. kalangan profesional.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 7

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Dinas membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaku usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas. (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini).

BAB IV

PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 12

Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa:

- a. penyediaan tenaga pendamping;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 15

Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, difasilitasi Dinas melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;

- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 16

Pelaku usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V

PENGEMBANGAN KADERISASI PEMUDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kaderisasi Pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
- (2) Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kaderisasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengembangan Kaderisasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan
 - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan bangsa.

- (3) Pengembangan Kaderisasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 20

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan; dan/atau
- e. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Bagian Kedua

Pengembangan Kemampuan dan Kapasitas Kepemimpinan Pemuda melalui Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal.

Pasal 22

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan pada jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi dibidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi.

Pasal 25

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Paragraf 2

Pendidikan Secara Berjenjang

Pasal 26

- (1) Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pendidikan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya, dan utama.
- (2) Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pendidikan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pendidikan tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pendidikan tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pasal 27

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui Pendidikan untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), paling kurang memuat:

- a. pengetahuan umum, meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sejarah Pergerakan Pemuda, dan Pengantar sistem ketatanegaraan;
- b. materi pokok, meliputi
 - 1) pengantar Moral dan Etika Kepemimpinan;
 - 2) pengantar kepemimpinan;
 - 3) pengantar Peraturan Perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) pengantar strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - 5) pawasan kebangsaan; dan
 - 6) pengantar manajemen;
- c. materi pendukung, meliputi pengantar komunikasi, pengantar teknik pemecahan masalah, pengantar pengambilan keputusan, dan dinamika kelompok.

Pasal 28

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:

- a. pengetahuan umum, meliputi:
 - 1) Pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Sejarah Pergerakan Pemuda dalam dinamika Perjuangan Bangsa; dan
 - 3) Sistem ketatanegaraan;
- b. materi pokok, meliputi:
 - 1) moral dan etika kepemimpinan;
 - 2) teknik dan seni kepemimpinan;
 - 3) peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - 5) wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional; dan
 - 6) manajemen organisasi.
- c. materi pendukung, meliputi:
 - 1) teknik komunikasi;
 - 2) permasalahan aktual dan strategis bidang Kepemudaan;
 - 3) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; dan
 - 4) dinamika kelompok.

Pasal 29

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:

- a. pengetahuan umum, meliputi:
 - 1) peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) peran pemuda dalam pembangunan nasional;
 - 3) peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
 - 4) peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
- b. materi pokok, meliputi:
 - 1) aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 - 2) pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan nasional;
 - 3) pengkajian strategi berbagai permasalahan nasional dan internasional;

- 4) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; dan
 - 5) manajemen konflik.
- c. materi pendukung yang meliputi:
- 1) komunikasi sosial;
 - 2) psikologi sosial;
 - 3) dinamika politik kebangsaan; dan
 - 4) studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat nasional dan internasional.

Paragraf 3

Pendidikan Tidak Berjenjang

Pasal 30

- (1) Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling kurang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sejarah pergerakan pemuda;
 - c. kebijakan Pembangunan Kepemudaan
 - d. bidang keahlian tertentu.
- (2) Bidang keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di bidang keahlian tersebut.

Pasal 31

Pengembangan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pendidikan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kemampuan dan Kapasitas Kepemimpinan Pemuda melalui Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemampuan dan Kapasitas Kepemimpinan Pemuda melalui Pembimbingan

Pasal 33

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kelima

Pengembangan Pendampingan Pemuda

Pasal 34

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inisiasi,
 - b. fasilitasi,
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi;

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam implementasi program-program pembangunan Jawa Barat di bidang Kepemudaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah, masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Bagian Keenam

Forum Kepemimpinan Pemuda

Pasal 35

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi dan
 - d. pertemuan Kepemudaan lainnya.
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan

BAB VI

PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG PENGEMBANGAN LAYANAN KEWIRAUSAHAAN, KEPELOPORAN DAN KADERISASI PEMUDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Prasarana Penunjang Pengembangan Layanan Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Kaderisasi Pemuda, terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau

f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Sarana Pengembangan Layanan Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Kaderisasi Pemuda, terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bagian Kedua

Penyediaan

Pasal 37

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
- a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat.

Pasal 38

Penyediaan prasarana dan sarana oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 41

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 43

Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;

- b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
- c. dukungan pendanaan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Wali Kota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
 - a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan kepada instansi Pemerintah.

Pasal 48

Pengelolaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan bagi pelaksanaan pengembangan layanan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kaderisasi pemuda di Daerah Provinsi dilakukan dengan cara pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR